



Sidang Serikat Buruh Global "Beyond Insecurity: Sebuah pendekatan baru untuk pekerjaan, upah dan distribusi kekayaan" 27 Agustus 2020

Menegaskan kembali hak-hak kolektif dan melakukan aksi sosial kolektif di era COVID-19

[alias solidaritas membunuh neoliberalisme]

Tak seorang pun dalam gerakan serikat global ingin kembali ke keadaan normal yang lama. Apa yang diperlukan untuk mengubah perdebatan? Apakah cara kita mengatur atau tuntutan yang kita buat? Apakah kita perlu membayangkan kembali pekerjaan, ekonomi atau demokrasi? Atau mungkin ketiganya?

DR.Hidayat Greenfield
Sekretaris Regional IUF Asia/Pacific
Agustus 27, 2020

Kondisi Normal yang lama tidak ada bahkan jika kita ingin kembali ke sana. Setelah krisis COVID-19, resesi dan keadaan serba sulit, kita telah mengubah keseimbangan kekuatan dan secara fundamental mengubah prioritas politik dan sosial kita untuk mulai membangun dunia yang lebih adil, jujur dan layak; atau kita telah tenggelam ke dalam masyarakat yang bahkan lebih rapuh, terpecah-pecah, dan terbagi-bagi dengan pengangguran massal, kemiskinan yang meluas, kediktatoran, dan perang yang tak terelakkan.

Mengalihkan perdebatan melibatkan pemahaman bahwa kerentanan dan kerapuhan yang diekspos oleh krisis COVID-19 bukanlah akibat dari kebijakan yang buruk atau pemerintahan yang buruk, tetapi dari patriarki, rasisme, dan neoliberalisme. Lebih dari 40 tahun neoliberalisme secara sistematis membongkar perlindungan sosial, perlindungan lapangan kerja, akses ke makanan dan perawatan kesehatan umum universal yang teramat sangat dibutuhkan saat ini. Bahkan kemampuan kita untuk bertindak dalam solidaritas - bertindak secara kolektif untuk kepentingan umum - telah sangat dirusak. Ini adalah hubungan neoliberal antara individualisme dan kepentingan-kepentingan pribadi yang membunuh kita sekarang, bukan virus corona.

Untuk membangun masa depan yang lebih baik, kita perlu mengatasi patriarki dan rasisme serta secara fundamental menantang kapitalisme - sebuah sistem yang mengubah segalanya menjadi komoditas yang dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Perubahan harus transformatif. Ini membutuhkan transformasi masyarakat dan sistem politik yang berlaku, tetapi juga mengubah serikat pekerja kita sehingga kita memiliki kemauan politik dan kekuatan untuk melihatnya.

Saat ini kita tidak memiliki kekuatan itu. Kita perlu membangunnya melalui pengorganisasian serikat, lebih banyak pengorganisasian, dan perjuangan. Dan untuk melakukan itu kita perlu menegaskan kembali hak-hak dasar serikat pekerja - hak untuk berorganisasi, hak untuk berunding bersama, hak untuk mogok. Kita dapat merevitalisasi dan menggunakan konvensi-konvensi ILO yang ada tentang hak atas kebebasan berserikat, hak untuk berunding bersama, hak untuk bekerja, hak atas perlindungan sosial, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja untuk membela hak-hak kolektif pekerja dan menciptakan ruang politik yang

kita butuhkan untuk mengorganisir. (Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja (No. 158) telah ditentang secara agresif oleh pengusaha dan pemerintah selama 40 tahun dan cukup banyak dilupakan oleh gerakan serikat pekerja. Namun perlindungan komprehensif terhadap pemecatan yang tidak adil sangat dibutuhkan dalam krisis ini.)

Yang tidak kita butuhkan adalah konvensi-konvensi baru ILO seperti konvensi yang diusulkan tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC). Hal ini tidak hanya menegaskan kembali kepentingan-kepentingan bisnis korporasi yang membawa kita ke dalam krisis ini, tetapi juga melegitimasi privatisasi regulasi sosial. Ini menandai akhir dari komitmen politik untuk akuntabilitas publik. Transformasi sosial dan politik yang kita butuhkan tidak bisa dimulai dengan kompromi. Ada perbedaan mendasar antara kompromi yang *dihasilkan dari* perjuangan, dan kompromi *daripada* perjuangan.

Kita harus mulai dengan menegaskan kembali bahwa hak kolektif atas kesehatan masyarakat, pendidikan, perumahan dan pangan dan gizi sebagai hak asasi manusia universal, bukan komoditas untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan.

Tahun ini adalah peringatan 100 tahun IUF dan perlu diperhatikan bahwa konstitusi IUF mengakui produksi, pengolahan dan distribusi pangan sebagai layanan sosial dasar kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa: *"Ini adalah tanggung jawab gerakan buruh dan, pertama-tama, pekerja di industri makanan dan sekutu, untuk memastikan bahwa sumber daya dunia dalam makanan digunakan untuk melayani kepentingan umum daripada kepentingan-kepentingan minoritas swasta atau publik."*

Sungguh, perluasan kekuasaan perusahaan atas sistem pangan global selama 40 tahun terakhir telah secara sistematis merusak kepentingan umum, dengan ratusan juta orang hidup dalam kelaparan. Ini akan semakin parah pada krisis pangan dunia yang akan datang. Namun kita kembali melihat beberapa serikat pekerja internasional menandatangani pernyataan [Ajakan Bertindak untuk para pemimpin dunia: mencegah krisis keamanan pangan global sambil memerangi COVID-19, 9 April 2020] yang mengakui kontrol perusahaan atas sistem pangan dunia melalui rezim perdagangan bebas dan bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan global ini berjanji untuk menyerahkan semuanya di tangan mereka selama mereka memberi makan orang-orang sepanjang jalan. Jadi *kelaparan* juga merupakan komoditas yang dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk bergerak maju, kita perlu membongkar rezim perdagangan bebas korporat, bukan memperbaikinya. Rezim perdagangan bebas korporat yang memperluas kendali korporasi atas pertanian dan sistem pangan dunia serta merusak kedaulatan pangan dan hak atas pangan harus dibongkar. Rezim perdagangan bebas korporat yang memaksakan privatisasi, komersialisasi, dan komodifikasi perawatan kesehatan harus dibongkar.

Kita harus melakukan ini karena de-komodifikasi dan nasionalisasi perawatan kesehatan; de-komodifikasi dan nasionalisasi air; investasi publik dalam pertanian dan pangan berkelanjutan; mempromosikan demokrasi energi - semuanya ilegal di bawah rezim ini. Manajer-manajer ekonomi yang tidak terpilih dan tidak bertanggung jawab yang menjalankan pemerintahan kita hanya akan menggunakan aturan dalam perjanjian perdagangan bebas untuk mencegah transformasi yang kita butuhkan. Perhatikan bahwa manajer-manajer

ekonomi yang sama mengatakan pada puncak pandemi global ini - dengan puluhan juta terinfeksi dan satu juta meninggal - kita *tidak mampu membayar* perawatan kesehatan umum universal. Ini tidak mungkin diterima. Ini bukan perdebatan tentang keterjangkauan dan anggaran pemerintah. Realokasi besar-besaran kekayaan dan sumber daya secara nasional dan internasional harus dilakukan. Kewajiban mendesak kita untuk membangun dan mengamankan akses universal terhadap hak asasi manusia melalui sarana kolektif tidak bisa *tidak terjangkau* atau *ilegal*.

Bulan lalu Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menerbitkan laporan berjudul, *Mencegah Pandemi Berikutnya: Penyakit Zoonosis dan cara memutus rantai penularan*. Dalam laporan itu mereka mengidentifikasi tujuh faktor yang dimediasi oleh manusia yang menjadi "pemicu-pemicu penyakit" dalam munculnya penyakit zoonosis seperti SARS-CoV-2:

1. *meningkatnya kebutuhan manusia akan protein hewani;*
2. *intensifikasi pertanian yang tidak berkelanjutan;*
3. *peningkatan pemanfaatan dan eksploitasi satwa liar;*
4. *pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan yang dipercepat oleh urbanisasi, perubahan penggunaan lahan dan industri ekstraktif;*
5. *peningkatan perjalanan dan transportasi;*
6. *perubahan pasokan makanan;*
7. *perubahan iklim.*

Daftar ini juga memberikan kita pemahaman yang baik tentang mengapa kembali ke kondisi "normal yang lama" bukanlah suatu pilihan. Ini akan menghasilkan pandemi lain dengan konsekuensi yang lebih berbahaya dalam krisis iklim yang semakin parah.

Jika kita mempertimbangkan tindakan kolektif sosial dan politik bersama yang diperlukan untuk mengatasi "pemicu-pemicu penyakit" ini untuk mencegah pandemi berikutnya, maka kita sudah berbicara tentang transformasi yang membutuhkan pembongkaran rezim neoliberal dan rezim perdagangan bebas perusahaan, merebut kembali negara dalam kepentingan publik, suatu gerakan menuju keberlanjutan yang dibangun di atas de-komodifikasi dan nasionalisasi, dan realokasi sumber daya secara besar-besaran untuk melakukan ini.

Hal itu pada gilirannya menunjukkan bahwa sangat penting untuk mewujudkan transformasi ini dan memulihkan tindakan kolektif dan solidaritas yang diperlukan untuk membangun dunia yang jujur, lebih adil, lebih layak dan berkelanjutan secara ekologis untuk ditinggali - dan tidak hanya untuk bertahan dari satu pandemi hingga berikutnya hingga perubahan iklim mengakhirinya. Sepertinya itu bukan pilihan, tapi suatu ajakan yang mendesak untuk bertindak.